

---

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010-2017**

<sup>1)</sup> Asti Nurpadilah, <sup>2)</sup> Rakhmi Amaroh

<sup>1)</sup>Alumni Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia  
Email: astinurpadilah95@gmail.com

<sup>2)</sup>Dosen Tetap Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia  
Email: asti.andayani@dewantara.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) The Effect of Local Revenue (PAD) on Capital Expenditures in Bogor Regency in 2010-2017. (2) Effect of General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditures in Bogor Regency in 2010-2017. (3) The effect of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) simultaneously on Capital Expenditures in Bogor Regency in 2010-2017. The results showed that: (1) Partial PAD testing has a positive and significant effect on capital expenditure, this is indicated by the value of t count is greater than the value of t table, namely  $(2.965 > 2.01505)$  with a significant level of less than 0.05 ( $0.031 < 0.05$ ). (2) DAU partial testing has a positive and significant effect on Capital Expenditures, this is indicated by the calculated t value greater than t table value  $(3.070 > 2.01505)$  with a significant level of less than 0.05 ( $0.028 < 0.05$ ). (3) Simultaneous testing of PAD and DAU has positive and significant simultaneous effect on Capital Expenditures, this is indicated by the calculated f value is greater than the f table value, namely  $(36.994 > 5.79)$  with a significant level of less than 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ). R<sup>2</sup> value of 93.7%, this value indicates that Bogor Regency local capital expenditure of 93.7% is influenced by PAD and DAU and the remaining 6.3% is influenced by other variables outside this research model or variables not examined.*

**Keywords:** *Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditures*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017. (3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengujian parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $(2,965 > 2,01505)$  dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ). (2) Pengujian parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $(3,070 > 2,01505)$  dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,028 < 0,05$ ). (3) Pengujian simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal hal ini ditunjukkan oleh nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel yaitu  $(36,994 > 5,79)$  dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Nilai R<sup>2</sup> sebesar 93,7%, nilai ini menunjukkan bahwa Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebesar 93,7% dipengaruhi oleh PAD dan DAU dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini atau variabel yang tidak diteliti.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal.*

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah yaitu perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah, hubungan keuangan serta membawa perubahan penting dalam pengelolaan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi juga merupakan kebutuhan objektif dalam menjalankan pemerintahan saat ini.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setelah Desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak

berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal antar daerah dengan adanya perbedaan kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya pemberian dana alokasi umum. produktif di daerah (Harianto, 2007).

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian modern pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan. Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Bogor juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti terlihat pada Tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bogor Tahun 2010-2017 (Dalam Ribu Rupiah)**

No	Tahun	Belanja Modal
1	2010	612.386.350.945,00
2	2011	703.670.729.991,00
3	2012	1.035.467.433.416,00
4	2013	1.316.781.706.310,00
5	2014	1.232.249.681.373,00
6	2015	1.459.647.299.638,00
7	2016	1.541.830.222.578,00
8	2017	1.525.152.052.623,00

Sumber: BPS Kabupaten Bogor (Kabupaten Bogor Dalam Angka 2011-2018) dan [www.bogorkab.bps.go.id](http://www.bogorkab.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah belanja modal di Kabupaten Bogor terlihat fluktuasi dari tahun ketahun namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2010 realisasi belanja modal di Kabupaten Bogor sebesar Rp 612.386.350.945. Peningkatan ini terjadi hingga tahun 2013 dimana belanja modal pemerintah Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp. 1.316.781.706.310. Terjadinya peningkatan belanja modal pemerintah Kabupaten Bogor dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, perkantoran dan rehabilitasi berbagai fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan sekolah. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.232.249.681.373 atau turun sebesar Rp. 84.532.024.937 dari tahun 2013. Pada tahun 2015 belanja modal Kabupaten Bogor terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 dimana belanja modal pemerintah Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp. 1.541.830.222.578. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 1.525.152.052.623 atau turun sebesar Rp. 16.678.169.955 dari tahun 2016. Tingginya pengeluaran belanja modal pemerintah di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya membangun daerah secara efektif sehingga dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari transfer dana alokasi umum ini adalah untuk mengurangi kesenjangan

fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah. Dengan adanya transfer dana ini bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri.

Jumlah belanja daerah dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dengan menemukan bahwa besarnya belanja modal sangat ditentukan oleh faktor dana alokasi umum (Adi, 2007), akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, seperti halnya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik.

Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali

pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun

Sementara menurut Halim (2012:87): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslog*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

#### 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

#### 2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”.

Dana Alokasi Umum termasuk sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer di tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran manapun. Dana ini digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik.

### 2.1.4 Pengertian Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002:67) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya”.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menambah aset tetap.

### 2.2 Hipotesis

$H_0$  = Tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial dan

simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.

$H_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.

$H_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.

$H_3$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian penjelasan (*explanation research*) dengan pendekatan kuantitatif,

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada data hasil *search* di website resmi Kabupaten Bogor ([www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id)) dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor ([www.bogorkab.bps.go.id](http://www.bogorkab.bps.go.id)).

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2018 sampai bulan April 2019.

### 3.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010-2017.

### 3.4 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2010-2017. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder.

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Bogor tahun 2010-2017. Sampel yang digunakan yakni data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 2010-2017.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2007) analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$\varepsilon$  = Error

#### 3.6.2 Uji Hipotesis

##### 3.6.2.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

##### 3.6.2.2 Uji Simultan (Uji f)

Uji Statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel pada *level of significant* 5%. Apabila nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

##### 3.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi adalah suatu cara atau teknik untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik dalam hubungan yang fungsional. Secara umum, dapat dinyatakan pula bahwa apabila ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap Variabel Y digunakan analisis regresi linier berganda.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-69450638574,685	231961331381,033		-2,99	,777
PAD	,210	,071	,508	2,965	,031
DAU	,525	,171	,526	3,070	,028

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 4.7. di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = -69.450.638.574,685 + 0,210 X_1 + 0,525 X_2 + \epsilon$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

1. Konstanta sebesar -69.450.638.574,685 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) dan Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>), maka Belanja Modal dianggap konstan sebesar -69.450.638.574,685.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 0,210, menyatakan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,210 satuan.

3. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>) sebesar 0,525, menyatakan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,525 satuan.

**4.2 Uji Hipotesis**

**4.2.1 Uji Parsial (Uji t)**

Uji t parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam analisis regresi:

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel:

1. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS:

1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

**4.2.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal  
 Nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu, diketahui rumus t tabel n-k-1= 8-3-1=5. Hasil diperoleh untuk t tabel (Sig. 0,05) sebesar 2,01505. Jadi, nilai t hitung PAD lebih dari nilai t tabel dan bertanda positif sebesar 2,965 (2,965>2,01505) dimana tingkat signifikan kurang dari 0,05 (0,031<0,05). Maka dapat disimpulkan

- bahwa hipotesis pertama diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y).
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu, diketahui rumus t tabel  $n-k-1 = 8-3-1=5$ . Hasil diperoleh untuk t tabel (Sig. 0,05) sebesar 2,01505. Jadi, nilai t hitung DAU lebih dari nilai t tabel dan bertanda positif sebesar 3,070 ( $3,070 > 2,01505$ ) dimana tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,028 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yang artinya Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

#### 4.2.3 Uji Simultan (Uji f)

Uji f bertujuan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) diperoleh nilai f hitung sebesar 36,994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan hasil diperoleh dari f tabel (Sig. 0,05) dengan  $Df_1=2$  dan  $Df_2=5$  sebesar 5,79. Hal ini menunjukkan bahwa f hitung  $>$  f tabel ( $36,994 > 5,79$ ) dan signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

#### 4.2.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,968 <sup>a</sup>	,937	,911	107901407818,63284

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.10. di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,937, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 93,7% sedangkan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini atau variabel yang tidak diteliti.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2010-2017. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu ( $2,965 > 2,01505$ ) dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ).
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2010-2017. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu ( $3,070 > 2,01505$ ) dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 ( $0,028 < 0,05$ ).
3. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2017. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $f$  hitung lebih besar dari nilai  $f$  tabel yaitu  $(36,994 > 5,79)$  dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05  $(0,001 < 0,05)$ . Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 93,7%, nilai ini menunjukkan bahwa Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebesar 93,7% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini atau variabel yang tidak diteliti.

## 5.2 Saran

Berikut saran sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sumber-sumber atau potensi daerah yang belum tergali sehingga PAD dapat meningkat. Misalnya dengan mendeteksi sumber pajak yang belum tergali dengan cara menjangkau wajib pajak baru atau dengan menerbitkan pajak baru. Selain itu dalam pemungutannya harus dengan pengawasan dan pelayanan yang baik.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Misalnya dengan meningkatkan Belanja Modal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan

umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah.

4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel penelitian agar hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, dan David Harianto. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Bogor dalam Angka 2011. BPS - Kabupaten Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Kabupaten Bogor dalam Angka 2012. BPS - Kabupaten Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Bogor dalam Angka 2013. BPS - Kabupaten Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Bogor dalam Angka 2014. BPS - Kabupaten Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Bogor dalam Angka 2015. BPS - Kabupaten Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Bogor dalam Angka 2016. CV. Prima, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Bogor dalam Angka 2017. CV. Prima, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Bogor dalam Angka 2018. CV. Prima, Bogor.
- Bupati Bogor (2016) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Cibinong.

- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. PT Indeks, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Edisi Kedua. PT. Macana Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Dwi Astuti, Novita. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1: 53-64.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- <http://bogorkab.go.id/>. [15 September 2018].
- <https://bogorkab.bps.go.id/>. [15 September 2018].
- Kefas, Caesar Pradata. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Jawa Tengah Tahun 2011-2013. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khasanah, Miftakhul, dan Anwar Made, Doni Wirshandono Yogivaria. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Kurniawan, Septian Dwi. 2010. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Skripsi Universitas Islam Negeri Malang.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2006) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2007) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar, Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2007) Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2000) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2000) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2001) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2009) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Priambudi, Wimpi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Singgih, Santoso. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, Dedi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya. Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
- Syaiful. 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>. [10 November 2018].
- Tambunan, T. H. Tulus. 2006. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal

Telaah dan Riset Akuntansi.Vol. 1,  
No. 2: 142-155.

Whidjaja, HAW. 2007. Penyelenggaraan  
Otonomi di Indonesia. PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

Zoelisty, Capridiea, dan Adityawarman.  
2014. Amanah Sebagai Konsep  
Pengendalian Internal Pada Pelaporan  
Keuangan Masjid (Studi Kasus pada  
Masjid di Lingkungan Universitas  
Diponegoro). *Diponegoro Journal Of  
Accounting*. Vol. 3, No. 3: 1-12.